



Kesiapan Sosial Mahasiswa Administrasi Publik dalam Menghadapi Implikasi Sosial *Artificial Intelligence* pada Transformasi Birokrasi Digital: Studi Kasus Universitas Cahaya Prima

Ismail^{1*}, Andi Hasri Tri Ulandari², Marhati³, Riswan Setiawan⁴

^{1,2,3,4} Universitas Cahaya Prima

Email: ismailmr.1997@gmail.com*

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Article History

Received: 24-02-2026

Accepted: 25-02-2026

Keywords:

Kesiapan sosial, kecerdasan buatan, administrasi publik, mahasiswa, birokrasi digital

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam birokrasi publik menuntut kesiapan sosial sumber daya manusia, khususnya mahasiswa administrasi negara sebagai calon aparatur negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan sosial mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (Ilmu Administrasi Negara) Universitas Cahaya Prima dalam menghadapi implikasi sosial penerapan *AI* dalam birokrasi publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kesiapan sosial awal, namun belum berkembang secara optimal. Pada dimensi kognitif, pemahaman terhadap *AI* masih terbatas pada aspek teknis dan fungsional. Pada dimensi afektif, mahasiswa menunjukkan sikap positif terhadap pemanfaatan *AI*, meskipun disertai kekhawatiran mengenai berkurangnya peran manusia dan potensi ketidakadilan algoritmik. Pada dimensi psikomotorik, mahasiswa mampu memanfaatkan *AI* dalam kegiatan akademik, tetapi belum sepenuhnya disertai kesadaran etis dan reflektif. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi literasi *AI* dan etika publik dalam pendidikan administrasi publik serta memberikan kontribusi akademik berupa penguatan kerangka konseptual kesiapan sosial tiga dimensi dalam konteks transformasi birokrasi berbasis kecerdasan buatan.

This is an open access article uses Open Journal Systems 3.5.0.0

Published by <https://ojs.ucp.ac.id>



[https://doi.org/ 10.65943/jurnap.2026.v1.i2.53](https://doi.org/10.65943/jurnap.2026.v1.i2.53)



PENDAHULUAN

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 telah mendorong transformasi signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan administrasi publik. Salah satu manifestasi utama transformasi tersebut adalah pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam berbagai fungsi birokrasi, seperti otomatisasi layanan administrasi, analisis data kebijakan berbasis algoritma, serta sistem pendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks administrasi publik, *AI* tidak lagi dipahami sekadar sebagai inovasi teknis, melainkan sebagai bagian integral dari digital governance yang berimplikasi langsung terhadap transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan legitimasi kebijakan publik (Indrajit, 2016; Kurniawan, 2020).

Pemanfaatan *AI* juga tercermin dalam penggunaan teknologi tersebut di kalangan perguruan tinggi (Crompton & Burke, 2023). Berdasarkan survei internasional, sekitar 80%

mahasiswa di seluruh dunia menggunakan *AI* generatif untuk mendukung kegiatan akademik, termasuk dalam penulisan tugas dan penelitian, sementara di Indonesia proporsinya mencapai sekitar 95% mahasiswa perguruan tinggi yang pernah menggunakan *AI* dalam kegiatan akademik mereka (Chegg, 2025). Selain itu, survei lain menunjukkan bahwa 59-71% pengguna internet di Indonesia telah menggunakan teknologi *AI* setidaknya sekali, dengan sebagian besar pengguna melaporkan penggunaan rutin terhadap alat-alat tersebut (Katadata Insight Center, 2024). Tren ini menunjukkan bahwa penetrasi *AI* di lingkungan akademik dan sosial masyarakat Indonesia cenderung meningkat pesat, namun pemahaman terhadap implikasi sosial dan etis teknologi tersebut masih berada pada tahap awal.

Di tingkat pemerintahan, data dari *Global AI Index 2024* menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 49 dari 83 negara dalam adopsi *AI*, sementara dalam *Government AI Readiness Index* berada di sekitar posisi 38 dari 181 negara, mengindikasikan bahwa meskipun *AI* berkembang cepat, kesiapan kebijakan dan kapasitas administratif pemerintahan Indonesia dalam memanfaatkan teknologi *AI* secara efektif dan etis masih menghadapi tantangan struktural (Universitas Indonesia, 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa transformasi digital birokrasi tidak semata terkait pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kesiapan sosial, regulasi, dan tata kelola yang adaptif terhadap implikasi teknologi (Nugroho, 2022).

Integrasi *AI* dalam birokrasi publik menawarkan peluang peningkatan efisiensi pelayanan, percepatan proses administrasi, serta optimalisasi pengelolaan data publik (Chairuddin et al., 2024). Namun demikian, penerapan *AI* juga menghadirkan tantangan sosial yang kompleks, termasuk risiko bias algoritmik yang dapat memperkuat ketidaksetaraan, ancaman terhadap privasi data individu, serta pergeseran peran manusia dalam pengambilan keputusan publik (Dita, Antara, & Winarno, 2025). Isu-isu ini menuntut keterlibatan aktor sosial yang tidak hanya memahami aspek teknis *AI*, tetapi juga memiliki kesiapan moral dan nilai etis yang kuat dalam mengelola implikasi sosialnya (Prasetyo & Hidayat, 2022).

Dalam perspektif sosial, kesiapan menghadapi inovasi teknologi merujuk pada kemampuan individu dalam memahami (kognitif), menerima dan menyikapi (afektif), serta bertindak secara adaptif dan bertanggung jawab (psikomotorik) terhadap perubahan yang terjadi (Sudjana, 2019). Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan membentuk kapasitas individu dalam merespons disrupsi teknologi secara kritis dan etis. Dalam konteks *AI* di sektor publik, kesiapan sosial menjadi komponen krusial karena teknologi ini memiliki konsekuensi sosial yang lebih luas dibandingkan sekadar perubahan prosedural teknis (Dwiyanto, 2021).

Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara memiliki posisi strategis sebagai calon aparatur sipil negara sekaligus pengelola kebijakan publik di masa depan. Mereka diharapkan tidak hanya menguasai penggunaan teknologi, tetapi juga memahami berbagai implikasi sosial, etika, dan tata kelola dari penggunaan *AI* dalam birokrasi. Namun, dalam praktiknya, pemanfaatan *AI* oleh mahasiswa sering kali masih berorientasi pada kepentingan akademik pragmatis, seperti penyelesaian tugas dan pencarian informasi, tanpa diiringi refleksi kritis mengenai dampaknya terhadap akuntabilitas publik dan keadilan kebijakan (Kurniawan, 2020; Nugroho, 2022).

Meskipun kajian mengenai transformasi digital pemerintahan dan digital *governance* semakin berkembang, penelitian empiris yang secara khusus mengkaji kesiapan sosial mahasiswa administrasi publik dalam menghadapi implikasi sosial *AI* di Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar studi terkait lebih berfokus pada aspek teknis adopsi teknologi atau literasi digital secara umum, dan belum secara mendalam mengintegrasikan dimensi kesiapan sosial kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam konteks birokrasi berbasis

AI. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi analisis kesiapan sosial tiga dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik secara simultan dalam konteks transformasi birokrasi berbasis kecerdasan buatan pada mahasiswa Administrasi Publik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada literasi digital atau aspek teknis adopsi teknologi, studi ini secara eksplisit memposisikan kesiapan sosial sebagai konstruksi multidimensional yang berorientasi pada implikasi etis, sosial, dan tata kelola publik dalam birokrasi digital.

Masalah utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya disparitas antara pesatnya adopsi kecerdasan buatan dalam birokrasi publik dan kesiapan sosial calon aparatur negara dalam merespons implikasi sosial, etika, dan moral dari teknologi tersebut. Tanpa kesiapan sosial yang memadai, kecerdasan buatan berpotensi menghasilkan praktik birokrasi yang efisien secara teknis tetapi lemah secara etis dan akuntabel.

Dalam konteks kekinian yang ditandai dengan percepatan transformasi digital pascapandemi serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berkeadilan, penguatan kesiapan sosial mahasiswa administrasi publik menjadi semakin relevan dan mendesak. Generasi muda tidak hanya dituntut menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi aktor kebijakan yang mampu mengelola teknologi secara bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan sosial mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Cahaya Prima dalam menghadapi implikasi sosial penerapan kecerdasan buatan dalam birokrasi publik. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan bentuk dan tingkat kesiapan sosial mahasiswa; (2) menganalisis kontribusi dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam membentuk kesiapan sosial tersebut; serta (3) mengidentifikasi tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam merespons transformasi birokrasi berbasis AI.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas pemahaman mengenai kesiapan sosial tiga dimensi dalam konteks transformasi birokrasi digital berbasis AI, serta memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan literasi AI, etika teknologi, dan nilai-nilai administrasi publik. Hal ini diharapkan dapat membantu mempersiapkan calon birokrat yang adaptif, kritis, dan bertanggung jawab dalam era kecerdasan buatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam kesiapan sosial mahasiswa dalam menghadapi implikasi sosial kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam konteks birokrasi publik (Moleong, 2017; Sugiyono, 2019). Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara kontekstual dan komprehensif pada satu setting tertentu, yaitu Universitas Cahaya Prima. Universitas ini dipilih karena memiliki Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang mempersiapkan mahasiswa sebagai calon birokrat dan pengelola kebijakan publik yang akan terlibat dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan pada tahun 2025.

Subjek penelitian adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2021 yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling (Sugiyono, 2019). Pemilihan informan didasarkan pada kriteria: (1) memiliki pemahaman dasar mengenai kecerdasan buatan (AI); (2) secara aktif menggunakan AI sebagai alat bantu dalam kegiatan akademik; dan (3) telah menempuh mata kuliah yang berkaitan dengan administrasi publik. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang mahasiswa. Informan terdiri atas mahasiswa semester akhir (semester 7-8) dengan rentang usia 21-23 tahun, yang

seluruhnya telah aktif menggunakan teknologi *AI* dalam kegiatan akademik serta telah menempuh mata kuliah inti administrasi publik seperti kebijakan publik dan manajemen pelayanan publik.

Objek penelitian adalah kesiapan sosial mahasiswa dalam menghadapi implikasi sosial kecerdasan buatan dalam birokrasi publik, yang dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu dimensi kognitif (pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep, fungsi, serta dampak sosial *AI*), dimensi afektif (sikap, motivasi, dan kesadaran etis terhadap penggunaan *AI* dalam tata kelola publik), serta dimensi psikomotorik (kemampuan praktis dalam menggunakan teknologi *AI* secara efektif dan bertanggung jawab) (Bloom et al., 1956).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan durasi rata-rata 30-60 menit per informan dan direkam dengan persetujuan responden untuk keperluan transkripsi. Observasi dilakukan untuk mengamati pola penggunaan *AI* dalam aktivitas akademik mahasiswa, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan menelaah kurikulum, silabus, dan bahan pembelajaran yang berkaitan dengan literasi digital dan teknologi. Kombinasi teknik ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif sekaligus meningkatkan validitas data (Denzin, 2012).

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Proses analisis dilakukan melalui tahapan transkripsi hasil wawancara, identifikasi kode awal (open coding), pengelompokan kode ke dalam kategori berdasarkan tiga dimensi kesiapan sosial (axial coding), serta interpretasi temuan secara reflektif untuk memperoleh pola dan makna yang mendalam. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan pengecekan ulang (member checking) terhadap beberapa informan untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan pengalaman yang disampaikan responden. Sebelum proses pengumpulan data dilakukan, seluruh informan diberikan penjelasan mengenai tujuan dan prosedur penelitian serta menandatangani persetujuan partisipasi (informed consent) secara sukarela. Identitas informan dijaga kerahasiaannya dengan menggunakan kode khusus dalam proses analisis dan pelaporan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap sejumlah temuan penting terkait kesiapan sosial Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Cahaya Prima dalam menghadapi implikasi sosial kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam birokrasi publik. Temuan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa, observasi terhadap aktivitas akademik, serta telaah dokumentasi pembelajaran. Analisis data disajikan secara tematik berdasarkan dimensi kesiapan sosial, yaitu dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta dinamika interaksi antar dimensi tersebut.

Dimensi Kognitif: Pemahaman Mahasiswa terhadap *AI* dan Implikasinya

Hasil wawancara menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa telah mengenal konsep dasar kecerdasan buatan dan memanfaatkan *AI* dalam kegiatan akademik, seperti pencarian informasi, penyusunan tugas, dan penerjemahan teks. Namun, pemahaman mereka mengenai penerapan *AI* dalam konteks birokrasi publik masih terbatas. Sebagian besar mahasiswa memandang *AI* sebagai alat bantu teknis, belum sebagai sistem yang memiliki implikasi sosial, etika, dan kebijakan publik yang kompleks. Salah satu informan (I11) menyatakan, "*Saya menggunakan AI untuk membantu menyusun tugas atau mencari referensi, tetapi belum terlalu memahami bagaimana AI itu bisa memengaruhi kebijakan publik atau*

keputusan pemerintah.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa masih berorientasi pada fungsi praktis, belum pada implikasi struktural dan normatif dalam birokrasi publik. Sebagaimana diungkapkan oleh informan (I7), *“AI memang bisa mempercepat pekerjaan, tetapi saya khawatir kalau keputusan penting sepenuhnya diserahkan pada sistem tanpa pertimbangan manusia.”* Kutipan ini mencerminkan adanya ambivalensi sikap yang menunjukkan proses transisi dalam kesiapan afektif mahasiswa.

Observasi dan dokumentasi pembelajaran menunjukkan bahwa pembahasan mengenai AI dalam perkuliahan masih bersifat umum dan belum terintegrasi secara sistematis dengan mata kuliah administrasi publik. Kondisi ini menyebabkan mahasiswa kurang memahami isu-isu seperti bias algoritmik, perlindungan data publik, dan tanggung jawab birokrasi dalam penggunaan AI. Temuan ini memperkuat argumentasi Nugroho (2022) bahwa kesiapan kebijakan AI tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kapasitas pemahaman aktor publik terhadap implikasi sosialnya. Selain itu, Dwiyanto (2021) menegaskan bahwa reformasi birokrasi digital harus disertai penguatan nilai akuntabilitas dan orientasi kepentingan publik, bukan sekadar efisiensi administratif. Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan pemahaman mahasiswa menunjukkan bahwa kesiapan kognitif masih berada pada level instrumental, belum mencapai level reflektif yang diperlukan dalam tata kelola birokrasi berbasis AI.

Dimensi Afektif: Sikap dan Persepsi terhadap AI dalam Birokrasi Publik

Dari sisi afektif, hasil penelitian menunjukkan sikap yang beragam. Sebagian mahasiswa menunjukkan sikap positif dan optimistis terhadap penggunaan AI dalam birokrasi, terutama terkait efisiensi kerja, percepatan pelayanan publik, dan pengurangan kesalahan administratif. AI dipersepsikan sebagai peluang untuk meningkatkan kinerja birokrasi yang selama ini dianggap lamban dan kurang responsif. Pandangan ini sejalan dengan Indrajit (2016) yang menyatakan bahwa digitalisasi pemerintahan dapat mendorong percepatan reformasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Namun demikian, terdapat pula mahasiswa yang mengekspresikan kekhawatiran terhadap dampak sosial AI, seperti berkurangnya peran manusia dalam pengambilan keputusan, potensi ketidakadilan akibat algoritma, serta ancaman terhadap lapangan kerja aparatur sipil negara. Sikap ambivalen ini mencerminkan bahwa kesiapan afektif mahasiswa masih berada pada tahap transisi, antara penerimaan terhadap inovasi teknologi dan kekhawatiran akan konsekuensi sosialnya. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan nilai etika, tanggung jawab publik, dan kesadaran sosial dalam pendidikan administrasi publik.

Dimensi Psikomotorik: Kemampuan Praktis dalam Menggunakan dan Merespons AI

Dimensi psikomotorik menunjukkan bahwa mahasiswa relatif terampil dalam menggunakan AI untuk kebutuhan akademik sehari-hari. Mereka mampu mengoperasikan berbagai aplikasi berbasis AI secara mandiri dan adaptif. Namun, kemampuan ini belum sepenuhnya diiringi dengan keterampilan reflektif dan etis dalam pemanfaatan AI.

Observasi menunjukkan bahwa penggunaan AI cenderung berorientasi pada hasil cepat, tanpa selalu disertai evaluasi kritis terhadap akurasi informasi, etika penggunaan, atau dampak sosial dari teknologi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kesiapan psikomotorik mahasiswa masih bersifat teknis, belum berkembang menjadi kompetensi profesional yang relevan dengan praktik birokrasi publik. Kurniawan (2020) menyatakan bahwa transformasi digital birokrasi memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang tidak hanya adaptif terhadap teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan analitis dan etis dalam mengelola informasi publik.

Dinamika Interaksi Antar Dimensi Kesiapan Sosial

Penelitian ini menemukan adanya keterkaitan yang erat antara dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam membentuk kesiapan sosial mahasiswa. Keterbatasan pemahaman konseptual mengenai AI berpengaruh pada sikap yang ambivalen, serta pada praktik penggunaan AI yang belum sepenuhnya bertanggung jawab. Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai implikasi sosial AI cenderung menunjukkan sikap yang lebih reflektif dan berhati-hati dalam memanfaatkan teknologi tersebut.

Interaksi antar dimensi ini menunjukkan bahwa kesiapan sosial tidak dapat dibangun secara parsial. Sudjana (2019) menjelaskan bahwa penguatan satu dimensi tanpa diikuti dimensi lainnya berpotensi menghasilkan kesiapan yang semu, yaitu keterampilan teknis tanpa kesadaran etis, atau sikap positif tanpa pemahaman yang memadai. Oleh karena itu, pendekatan holistik menjadi kunci dalam mempersiapkan mahasiswa administrasi publik menghadapi transformasi birokrasi berbasis kecerdasan buatan.

Dengan demikian, temuan empiris penelitian ini mengkonfirmasi kerangka taksonomi Bloom bahwa perkembangan domain kognitif, afektif, dan psikomotorik bersifat hierarkis dan saling memengaruhi. Ketika pemahaman konseptual belum mendalam, maka sikap dan praktik penggunaan teknologi cenderung bersifat pragmatis. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi ketiga domain tersebut menjadi prasyarat penting dalam membangun kesiapan sosial yang komprehensif dalam birokrasi digital.

Implikasi terhadap Pendidikan Administrasi Publik

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Cahaya Prima memiliki kesiapan sosial awal dalam menghadapi implikasi AI, namun kesiapan tersebut masih belum optimal. Tantangan utama terletak pada keterbatasan integrasi materi AI dan etika teknologi dalam kurikulum, serta belum adanya pembelajaran yang secara eksplisit mengaitkan teknologi AI dengan praktik dan nilai-nilai birokrasi publik.

Temuan ini menegaskan bahwa pengembangan kesiapan sosial mahasiswa perlu diarahkan pada integrasi literasi AI, etika publik, dan kompetensi profesional secara simultan. Dwiyanto (2021) menegaskan bahwa birokrasi modern membutuhkan aparatur yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan memahami keterkaitan antar dimensi kesiapan sosial, institusi pendidikan dan pembuat kebijakan dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih adaptif dan relevan dalam mempersiapkan calon birokrat di era kecerdasan buatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Administrasi Publik Universitas Cahaya Prima telah menunjukkan kesiapan sosial awal dalam menghadapi implikasi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam birokrasi publik. Kesiapan ini tampak dari pemanfaatan AI dalam kegiatan akademik serta kesadaran awal akan potensi AI dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Namun, kesiapan tersebut belum berkembang secara optimal dan menyeluruh.

Pada dimensi kognitif, pemahaman mahasiswa terhadap AI masih berfokus pada aspek teknis dan fungsional, sementara pemahaman mengenai implikasi sosial, etika, dan kebijakan publik belum terbentuk secara utuh. Hal ini menyebabkan AI cenderung dipandang sebagai alat administratif semata, bukan sebagai sistem yang memiliki konsekuensi sosial dan moral yang kompleks.

Dari sisi afektif, mahasiswa menunjukkan sikap yang beragam, mulai dari optimisme terhadap peningkatan kinerja birokrasi hingga kekhawatiran terhadap pengurangan peran manusia, ketidakadilan algoritmik, dan dampak terhadap lapangan kerja. Sikap ambivalen

ini mengindikasikan bahwa kesiapan afektif masih berada pada tahap transisi dan memerlukan penguatan nilai etika serta tanggung jawab publik.

Pada dimensi psikomotorik, mahasiswa relatif mampu memanfaatkan AI secara praktis, namun penggunaan tersebut belum sepenuhnya disertai keterampilan reflektif dan pertimbangan etis. Orientasi penggunaan AI masih didominasi aspek efisiensi dan kemudahan, tanpa selalu memperhatikan akurasi, tanggung jawab, dan dampak sosial.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kesiapan sosial mahasiswa dalam menghadapi implikasi AI perlu dibangun secara terintegrasi melalui penguatan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Temuan ini menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mengintegrasikan literasi AI, etika teknologi, dan nilai-nilai administrasi publik dalam kurikulum, agar mahasiswa sebagai calon birokrat tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan etika dalam menghadapi transformasi birokrasi berbasis AI.

Ke depan, penguatan kesiapan sosial mahasiswa administrasi publik menjadi fondasi strategis dalam memastikan bahwa transformasi birokrasi berbasis kecerdasan buatan tidak hanya berorientasi pada efisiensi teknis, tetapi juga pada keadilan sosial, akuntabilitas, dan nilai-nilai pelayanan publik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah informan yang terbatas pada satu program studi dan satu institusi pendidikan menyebabkan temuan belum dapat digeneralisasikan secara luas. Kedua, penelitian ini berfokus pada konteks akademik sehingga belum menggambarkan secara langsung praktik implementasi AI dalam birokrasi pemerintahan yang nyata. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak institusi, memperluas karakteristik responden, serta mengkaji implementasi kesiapan sosial dalam konteks birokrasi publik yang lebih konkret dan komparatif.

REFERENSI

- Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals*. Longmans.
- Chairuddin, A., Rifdan, R., Ilyas, A. S., Mustari, S., Suprianto, S., & Rizaputra, R. (2024). The role of artificial intelligence in enhancing efficiency, transparency, and inclusivity of public services in Indonesia: Opportunities, challenges, and strategic approaches. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 14(2). <https://doi.org/10.26858/jiap.v14i2.67932>
- Chegg. (2025). *Global student survey on generative AI usage 2025*. Chegg Research Report.
- Crompton, H., & Burke, D. (2023). Artificial intelligence in higher education: The state of the field. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20, 22. <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00392-8>
- Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2), 80-88. <https://doi.org/10.1177/1558689812437186>
- Dita, O. P., Antara, R. M., & Winarno, A. (2025). Tanggung jawab etis penggunaan artificial intelligence di tanah pendidikan: Formulasi paradigma baru untuk teknologi otonom. *Master Manajemen*, 3(2), 57-83. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.816>
- Dwiyanto, A. (2021). *Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif*. Gadjah Mada University Press.
- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic government: Konsep dan strategi pelayanan publik berbasis internet*. Andi.

- Katadata Insight Center. (2024). *Survei penggunaan artificial intelligence di Indonesia 2024*. Katadata Insight Center.
- Kurniawan, T. (2020). Transformasi digital dalam reformasi birokrasi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 12(2), 115-130.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Y. (2022). Tantangan kebijakan kecerdasan buatan dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 26(1), 45-58.
- Prasetyo, A., & Hidayat, R. (2022). Etika digital dan tantangan kecerdasan buatan dalam pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(3), 210-223.
- Sudjana, N. (2019). *Penilaian hasil proses belajar mengajar*. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Universitas Indonesia. (2025). *AI in public sector: A call for digital transformation*. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia. <https://fia.ui.ac.id/id/ai-in-public-sector-a-call-for-digital-transformation/>